



Media: Radar

Hari: Jumat

Tanggal: 21 Mei 2021

Halaman: 1



Khawatir Bank BPD DIY Turun Kelas Jadi BPR

Sambungan dari hal 1

Sedangkan dalam perubahan kedua Perda DIY Nomor 5 Tahun 2013 diamanatkan tambahan modal dari APBD DIJ baru selesai pada 2025. Ada selisih waktu selama setahun antara kebijakan OJK dengan Perda DIJ.

"Kami khawatir kalau tidak dipenuhi pada 2024, status Bank BPD DIY bisa diturunkan menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sesuai yang disampaikan OJK," ujar Ketua Pansus Pengawasan Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DPRD DIJ Yuni Satia Rahayu dalam rapat kerja di gedung parlemen, kemarin (20/5).

Dalam beberapa kali rapat kerja pansus dengan Pemprov DIJ kepastian penyelesaian penyertaan modal ke Bank BPD DIY itu selalu ditanyakan beberapa anggota dewan. Bahkan sebelum libur Lebaran, pansus meminta kepastian dan ketegasan dari pemprov. Sebab, kepastian memenuhi penyertaan modal bukan hanya menjadi kewajiban pemprov. Namun juga pemerintah kabupaten dan kota se-DIJ.

"Kami minta diadakan koordinasi menyangkut komitmen kabupaten dan kota," ujar Neni, sapaan akrab mantan wakil bupati Sleman ini.

Salah satu anggota pansus RB, Dwi Wahyu Budiantoro berbicara lebih keras. Dia mengaku

gamang kewajiban penyerataan modal itu bisa dipenuhi 2024. Ada banyak faktor yang membuat Dwi agak pesimistis. Di antaranya dampak penanganan Covid-19 embutuhkan banyak anggaran. Alokasi dana pemerintah daerah terkuras. Akibatnya beberapa daerah harus mengadakan *refocusing* APBD.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DIJ mencontohkan yang terjadi di DIJ. Sesuai amanat perda, tahun ini harus memberikan tambahan modal ke Bank BPD DIJ sebesar Rp 115 miliar. Namun kemampuan keuangan daerah baru tersedia Rp 75 miliar.

"Kekurangannya masih banyak," tuturnya. Secara keseluruhan hingga 2021 ini kekurangan tambahan modal Bank BPD DIY mencapai kurang lebih Rp 625 miliar. Kewajiban itu harus dapat dipenuhi dalam waktu kurang dari 3 tahun. "Tahun Anggaran 2024 tinggal tiga tahun. Perhitungan saya, ini bukan angka yang sedikit," tegasnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKA) DIJ Beny Suharsono menjawab semua keraguan pansus itu. Mantan Sekwan DPRD DIJ itu optimistis permintaan OJK bisa dipenuhi. "Bahkan kami bisa penuhi dengan waktu yang bisa lebih cepat sebelum 2025," ujar Beny.

Di depan rapat kerja, dia men-

informasikan adanya komitmen dari seluruh sekretaris daerah (Sekda) kabupaten dan kota se-DIJ untuk memenuhi kewajiban penyertaan modal ke Bank BPD DIY. Angka Rp 3 triliun akan dipenuhi. Dasarnya mengacu pada perda tentang penyertaan modal ke Bank BPD di masing-masing kabupaten dan kota. "Semua Sekda kabupaten dan kota sepakat," ungkap kepala Bappeda DIJ.

Forum Sekda se-DIJ itu diadakan belum lama ini. Pertemuan langsung dipimpin Sekprov DIJ Kadamanta Baskara Aji. Dari forum itu diperoleh gambaran rencana setoran modal dari Pemprov DIJ, Pemkab Sleman, Bantul, Kulonprogo dan Pemkab Gunungkidul serta Pemkot Jogja.

Dari lima Sekda yang diundang, hanya Sekda Kulonprogo Astungkoro yang absen. Dia diwakili kepala BKAD Kulonprogo. "Kulonprogo merupakan kabupaten yang paling tertib memenuhi kewajiban penyertaan modal sebagaimana diamanatkan perda kabupaten setempat," jelas Beny.

Meski menjelaskan dengan nada optimistis, hingga April 2021 ini realisasi setoran modal ke Bank BPD DIY baru dilakukan dua pemerintah daerah. Yakni Pemprov DIJ Rp 75 miliar dan Pemkab Kulonprogo Rp 25 miliar. Sedangkan empat daerah lainnya yakni Sleman, Bantul, Gunungkidul

dan Kota Jogja masih nihil.

Tahun ini Sleman merencanakan menambah modal Rp 5 miliar, Gunungkidul Rp 36 miliar dan Kota Jogja Rp 40 miliar. Sedangkan TA 2022, Pemprov DIJ Rp 283,1 miliar, Sleman Rp 15 miliar, Bantul Rp 17 miliar, Kulonprogo Rp 27,5 miliar, Gunungkidul Rp 30 miliar, dan Kota Jogja Rp 44,8 miliar.

TA 2023 Pemprov DIJ Rp 299,8 miliar, Sleman Rp 59,5 miliar, Bantul Rp 36,8 miliar, Kulonprogo Rp 30 miliar, Gunungkidul Rp 30 miliar dan Kota Jogja Rp 54,6 miliar.

Berikutnya TA 2024 Pemprov DIJ Rp 81,7 miliar, Sleman Rp 55,5 miliar, Bantul Rp 36,8 miliar, Kulonprogo Rp 32 miliar, Gunungkidul Rp 30 miliar dan Kota Jogja Rp 44,8 miliar. Selanjutnya TA 2025 Pemprov DIJ Rp 467,4 miliar, Sleman Rp 199,1 miliar, Bantul Rp 93,8 miliar, Kulonprogo Rp 32,9 miliar, Gunungkidul Rp 26,9 miliar, dan Kota Jogja Rp 69,4 miliar.

Anggota Pansus Hanum Salsabiela Rais sempat mempertanyakan adanya daerah seperti Bantul yang tidak merencanakan setoran modal ke Bank BPD DIY pada TA 2021 ini. Menanggapi itu, Beny menjelaskan hal itu terjadi karena adanya kebijakan *refocusing* anggaran. "Komitmennya tetap akan dipenuhi sesuai waktunya," tegas mantan kepala Biro Tata Pemerintahan Setprov DIJ ini. (kus/laz/tj)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 18 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005